

MANAJEMEN KURIKULUM MERDEKA PADA MATA PELAJARAN PPKn DI SMA NEGERI 6 KOTA TERNATE

Mohtar Kamisi¹, Muhammad Arif Wicaksono²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun

email, mohtarkamisi@gmail.com

Abstract

The independent curriculum is a way to answer the challenges of education that occur due to the post-pandemic education crisis. The curriculum of the learning process is the lack of discipline of teachers in carrying out the learning process in the classroom. For example, often late to class and not preparing teaching materials such as lesson plans and syllabuses during the learning process. This is related to the lack of understanding of teachers about the process of making teaching materials such as lesson plans and syllabuses.

This research method uses a descriptive research type through a qualitative approach. Qualitative research is a descriptive research by analyzing through an inductive approach. This study emphasizes the theoretical basis which functions to be the focus of research when in the field. The place of this research will be carried out at SMA Negeri 6 Kota Ternate. The time of implementation of this research was carried out for six months from March to August 2024. The subjects of this research were the Principal, Vice Principal for Curriculum, Vice Principal for Student Affairs, and Teachers. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study indicate that the independent curriculum implemented in SMA Negeri 6 Kota Ternate is still relatively new for teachers and students, related to the implementation of the independent curriculum, many students and teachers are still confused about the implementation of the independent curriculum. One of them is in the PPKn subject. Therefore, teachers must know more about the implementation of the independent curriculum in the learning process at school. Teachers must also understand that the assessment, teaching modules and other components in the independent curriculum with the 2013 curriculum are very different. The independent curriculum is a form of improvement of the 2013 curriculum, of course, there are many responses from several parties, teachers, students, and parents. From several related parties, there are some who support and there are also many who complain about the changes in the independent curriculum that have been implemented.

Keywords: Independent Curriculum, PPKn Teachers, and SMA Negeri 6 Kota Ternate

PENDAHULUAN

Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik.

Konsep Kurikulum Merdeka Belajar mendorong seluruh peserta didik agar dapat lebih aktif dalam pembelajaran sesuai dengan cara belajar yang dibutuhkan. Dengan begitu, siswa tidak hanya mengikuti kurikulum yang sudah disusun pemerintah saja secara pasif, namun juga diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk menentukan cara belajar sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam dunia pendidikan Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. PPKN berfokus pada pengajaran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia, serta tentang kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, konstitusi, dan aspek-aspek penting lainnya yang terkait dengan kepribadian dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mata pelajaran PPKN dirancang untuk membantu mengembangkan pemahaman siswa tentang identitas nasional, etika, moral, dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Melalui pembelajaran PPKN, siswa diharapkan dapat menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan memahami bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kerangka sistem pemerintahan dan masyarakat Indonesia.

Implementasi Kurikulum Merdeka, pada proses pembelajarannya lebih menggunakan pendekatan diferensiasi. Sementara itu ciri khusus pada kurikulum ini untuk menunjukkan secara tegas posisi kediferensian adalah mengelompokkan capaian pembelajaran siswa berdasarkan fase pertumbuhan anak. Fase yang diakomodir pada kurikulum terdapat 6 fase, yaitu fase A, B, C, D, E dan F. kemudian ditambah fase pondasi untuk anak usia dini. Pembagian fase ini, menurut pendapat pengembang sangat monumental perubahannya. Mengapa? Karena capaian pembelajaran dengan menyesuaikan fase pertumbuhan baru kali ini diluncurkan oleh kementerian secara tegas. Pembagian capaian belajar berbasis fase, sebenarnya akan lebih membantu guru supaya pembelajaran di kelas semakin efektif. Adapaun bagaimana cara guru mengorganisasi pembelajaran supaya menjadi efektif? Nah pada bahasan kali ini akan dicoba dikupas secara mendasar tentang bagaimana mewujudkan pembelajaran yang efektif pada pembelajaran diferensiasi ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menganalisis melalui pendekatan induktif. Pada penelitian ini menonjolkan

pada landasan teori yang dimana berfungsi untuk menjadi fokus penelitian ketika di lapangan. Tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 6 Kota Ternate. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama enam bulan mulai bulan Maret sampai dengan Agustus 2024. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Wakasek Kesiswaan, dan Guru. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Pembelajaran Kurikulum Merdeka dalam Mata Pelajaran PPKn Kelas X di SMA Negeri 6 Kota Ternate.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMA Negeri 6 Kota Ternate pada tanggal 11 Mei 2024, dilakukan pengamatan secara langsung tentang Penerapan pembelajaran kurikulum merdeka dalam mata pelajaran PPKn Kelas X di SMA Negeri 6 Kota Ternate. Di sekolah tersebut sudah baik dalam penerapannya, sekolah telah melakukan kegiatan yang wajib dilakukan oleh guru maupun peserta didik yang berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan sebagai berikut: Hasil wawancara pada tanggal 11 Mei 2024 di ruang kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate dengan Bapak Suryadi Idrus S.Pd, menyampaikan bahwa kurikulum merdeka merupakan sebuah cara dalam menjawab tantangan Pendidikan yang terjadi akibat adanya krisis Pendidikan paska pandemi. Kurikulum proses pembelajaran adalah kurang disiplinnya guru dalam melaksanakan proses pembelajaran didalam kelas. Misalnya, sering terlambat masuk kelas dan tidak mempersiapkan bahan ajar seperti RPP dan silabus saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini berhubungan dengan kurangnya pemahaman para guru tentang proses pembuatan bahan ajar seperti RPP dan silabus. Ditambah lagi sudah ada penerapan kurikulum merdeka belajar yang mungkin ini menjadi hal baru bagi para guru yang ada di sekolah. Untuk itu dalam hal menyikapi masalah ini kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah bidang Kurikulum menyediakan suatu wadah untuk melakukan sosialisasi tentang tata cara membuat bahan ajar yang baru (Merdeka Belajar) misalnya *workshop* atau pelatihan-pelatihan tentang cara membuat bahan ajar lainnya. Kebiasaan guru yang kurang disiplin waktu ini masih sering dijumpai pada guru yang mungkin sudah terbiasa atau dalam hal pendekatan emosional dengan kepala sekolah sudah sangat dekat sehingga menganggap remeh hal-hal yang demikian. Untuk itu kepala sekolah bersama wakil-wakil kepala sekolah terutama saya selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum kami membuat sederet peraturan kemudian disosialisasikan kepada guru-guru saat ada rapat yang diselenggarakan oleh kepalasekolah. (Hasil Wawancara 11-06-2024).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 12 Mei 2024 di ruang kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate dengan bapak Ibka Miradji S.Pd, menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi penghambat adalah kurang perhatiannya guru terhadap kondisi peserta didik dan kondisi ruang kelas dalam proses belajar mengajar yang kurang memadai. Pembelajaran yang masih sering berpusat pada guru sehingga peserta didik merasa bosan dan jenuh untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Kedepannya guru perlu terlebih dahulu mengetahui

kondisi ruang kelas sebelum proses pembelajaran berlangsung supaya peserta didik bisa dengan lualasa dalam menerima penyampaian materi dari guru.

Memberikan dan lansung sikap disiplin ketika pembelajaran daring, guru PPKn tidak bisa memberikan taula dan yang beragam pada peserta didik dikarenakan terbatasnya ruang dan waktu. Ketika proses pembelajaran offline, guru PPKn bisa memberikan tauladan kedisiplinan mulai dari atribut atau seragam yang dipakai, sikap ketika mengikuti upacara, kehadiran guru di dalam kelas dan tidak meninggalkan kelas tanpa izin, dan lain-lain. Namun, ketika proses pembelajaran daring guru PPKn hanya bisa memberi tauladan langsung sikap disiplin melalui kehadiran sebelum pembelajaran dimulai.

Selama proses pembelajaran daring ini berlangsung, pihak sekolah beserta guru memberi kelonggaran bagi peserta didik dalam memakai atribut lengkap selama proses pembelajaran secara daring, hal ini dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pihak sekolah beserta guru sepakat untuk memberikan toleransi yang lebih pada peserta didik, karena dengan situasi pandemi ini pihak sekolah tidak bisa menuntut yang muluk-muluk kepada peserta didik. Tatahan syariat, teori, dan formalitas bukan perkara yang urgent dalam situasi ini, melainkan kenyamanan peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran dan mendapatkan haknya. (Hasil Wawancara, 12-07-202).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 13 Mei 2024 di ruang kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate dengan Ibu Fahria Bahmid SS, menyampaikan bahwa diperlukan perencanaan yang sistematis dari *stakeholder* sekolah. Kepala sekolah sebagai bekerja sama dengan spara guru, yayasan, wali murid, dan lingkungan sekolah dalam penentu arah kebijakan sekolah, sedangkan tenaga pendidik dan kependidikan menyampaikan arah kebijakan sesuai visi misi, dan tujuan sekolah, sehingga kebijakan sekolah akan terlaksana dengan baik. Perencanaan hidden curriculum pesantren dalam dalam mengembangkan karakter toleransi siswa di Sekolah. Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate sudah sesuai dengan visi misi sekolah dalam membentuk akhlakul karimah. Perencanaan kebijakan tersebut adanya rapat sekolah, komite sekolah dengan tenaga pendidik dalam menentukan struktur kurikulum dan muatan kurikulum Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Mei 2024 di ruang kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate dengan Ibu Rina M Saleh S.Pd, menyampaikan bahwa pembelajaran PPKn khususnya dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran, para guru melakukan berbagai upaya pembentukan karakter peserta didik melalui kegiatan kurikulum tersembunyi yang menunjang karakter religius, disiplin, santun, peduli, dan partisipatif. Oleh karena itu, kurikulum tersembunyi muatannya bukan sebagai bahan pelajaran, melainkan penekanan sebagai sebuah penanaman sikap, kebijakan, dan penataan lingkungan dengan kepentingan masing-masing. Pendidikan karakter merupakan salah satu Kompetensi Inti yang harus diajarkan kepada peserta didik dalam mapel PPKn, yang mana masuk dalam Kompetensi Inti sikap sosial. Kompetensi Inti tersebut merupakan tingkat kemampuan peserta didik untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang terdapat di dalam RPP. Jadi kita para guru menggunakan pedoman tersebut dan memiliki tanggung jawab memberikan pengetahuan mengenai karakter terutama disiplin pada peserta didik.



Foto 1 dan 2. Bersama Kepala Sekolah dan wakasek Kesiswaan memantau pembuatan RPP dan modul Ajar.

Kendala Penerapan Pembelajaran Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran PPKn Kelas X di SMA Negeri 6 Kota Ternate.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di SMA Negeri 6 Kota Ternate pada tanggal 11- 12 Mei 2024, dilakukan pengamatan secara langsung tentang Kendala dalam Penerapan pembelajaran kurikulum merdeka dalam pembelajaran PPKn Kelas X di SMA Negeri 6 Kota Ternate. Sekolah tersebut sudah baik dalam penerapannya, sekolah telah melakukan kegiatan yang wajib dilakukan oleh guru maupun peserta didik yang berkaitan dengan penerapan kurikulum merdeka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan sebagai berikut: Hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 di ruang kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate dengan Bapak Suryadi Idrus S.Pd, menyampaikan bahwa Selama kurikulum tersebut diterapkan di Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate, masih ada beberapa hal yang dirasa kurang paham oleh guru dan kepala sekolah. Masih banyak guru-guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun penilaian sumatif. Guru masih bingung penilaian apa yang dimasukkan sebagai nilai sumatif serta bagaimana cara dalam menyusunnya. Selain itu, dalam penerapan kurikulum ini masih dibutuhkan adanya pelatihan-pelatihan lainnya yang membahas secara mendalam per-bagian untuk memberikan gambaran secara jelas pada guru dan kepala sekolah.

Demikian, dengan waktu pelatihan yang singkat, narasumber dalam penelitian ini berpendapat bahwa masih banyak materi yang belum dipahami serta dibahas secara mendalam. Waktu tersebut dirasa kurang cukup untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate. Setelah berjalan selama satu semester ini, implementasi kurikulum merdeka di Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate masih mengalami beberapa hambatan. Terutama kaitannya dengan pemahaman guru yang masih kurang. Menurut pendapat narasumber, dalam menghadapi permasalahan tersebut narasumber sudah mengikuti

berbagai pelatihan yang diadakan baik di gugus maupun pelatihan lainnya. Namun kurikulum merdeka ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempelajari bagian-bagiannya secara mendalam. (Hasil Wawancara 11-08-2024).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 di ruang kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate dengan Bapak Ibka miradji S.Pd, menyampaikan bahwa perbedaan kurikulum merdeka dengan kurikulum 2013 yaitu adanya kebebasan pengelolaan waktu belajar pada setiap bidang ilmu. Pada kurikulum 2013, terdapat pendidikan karakter melalui adanya profil pelajar Pancasila. Selain itu, pada pelaksanaan dari Pendidikan karakter belum ditekankan secara langsung. Hal tersebut terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung cukup lama. Sehingga mengakibatkan terhambatnya proses pembelajaran secara langsung dan pembelajaran yang dilaksanakan hanya satu arah.

Kurikulum merdeka peserta didik diajarkan melalui pembelajaran secara langsung berkaitan dengan materi serta adanya proyek profil pelajar Pancasila yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Proyek yang dimaksud yaitu kokurikuler yang disesuaikan dengan tema pembelajaran yang sedang dibahas. Contoh dari proyek tersebut yaitu pembelajaran di luar kelas dengan mengenalkan cara membuat makanan tradisional dengan bahan dasar singkong yang di mana singkong merupakan salahsatu bahan yang mudah ditemukan di lingkungan kehidupan peserta didik. Proyek ini disusun untuk memanfaatkan hasil alam yang ada di lingkungan peserta didik kemudian guru membebaskan peserta didik untuk berkreasi dalam mengolah hasil alam berupa singkong tersebut. Dari proses tersebut dapat menumbuhkan sertameningkatkan karakter peserta didik baik yang sudah ada maupun yang belum.

Penyusunan, RPP masih lebih mudah hal tersebut disampaikan dengan alasan RPP lebih mengarah pada poin pembelajaran sekali. Sedangkan pada modul ajar terdapat banyak komponen, namun untuk penggunaan modul ajar tersebut dapat digunakan lebih dari sekali pertemuan. Penyusunan modul ajar dengan menggunakan kurikulum merdeka ini juga dianggap lebih leluasa. Narasumber berpendapat bahwa pada penyusunan modul ajar dianggap lebihleluasa karena sumber belajar tidak hanya mengacu pada buku. Walaupun pada kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 sudah ada penerapan tersebut. Namun pada kurikulum merdeka ini guru merasa lebih banyak referensi serta adanya berbagai bahan diskusi baru terkait kurikulum merdeka. Meskipun guru sudah mengikuti berbagai pelatihan, namun dari sisi perencanaan guru masih mengandalkan contoh modul ajar yang ada sebagai panduan dalam pembelajaran.

Implementasi dari kurikulum merdeka ini, SMA Negeri 6 Kota Ternate telah merencanakan proyek profil pelajar Pancasila. Proyek tersebut berupa kegiatan daur ulang sampah, pemanfaatan lahan kosong dengan bercocok tanam. Proyek tersebut dirancang dengan tujuan mendekatkan peserta didik dengan lingkungan tempat tinggalnya. (Hasil Wawancara 13-07-2024).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 di ruang kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate dengan Ibu Fahria Bahmid, SS, menyampaikan bahwa secara jelas pada guru dan kepala sekolah. Dengan waktu pelatihan yang singkat, narasumber dalam penelitian ini berpendapat bahwa masih banyak materi yang belum dipahami serta dibahas secara mendalam. Waktu tersebut dirasa kurang cukup untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka di SMA Negeri 6 Kota Ternate. Setelah berjalan selama satu semester ini, implementasi kurikulum merdeka

di masih mengalami beberapa hambatan. Terutama kaitannya dengan pemahaman guru yang masih kurang. dalam menghadapi permasalahan tersebut narasumber sudah mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan baik di gugus maupun pelatihan lainnya. Namun kurikulum merdeka ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempelajari bagian-bagiannya secara mendalam.

Hasil wawancara pada tanggal 11 Juni 2024 di ruang kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate dengan Ibu Rina M. Saleh S.Pd., menyampaikan bahwa terdapat esensi yang berbeda pada proses perencanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka. Pada kurikulum 2013, perencanaan pembelajaran disebut dengan nama Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran atau (RPP) sedangkan pada kurikulum merdeka berubah menjadi modul ajar. Menurut narasumber dari penelitian ini perbedaan yang dirasa terletak pada hilangnya Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang dulu ada pada RPP kurikulum 2013. Pada kurikulum merdeka, KI diubah menjadi Capaian Pembelajaran. Dari perubahan tersebut terdapat perbedaan antara CP dengan KI. Perbedaan tersebut yaitu pada kurikulum merdeka CP merupakan rentan waktu yang dialokasikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan yang dirancang berdasarkan fase. Dari CP ini akan dijabarkan menjadi alur tujuan pembelajaran (ATP). Sedangkan pada kurikulum 2013, adanya kompetensi inti (KI) dijabarkan menjadi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, serta, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Selain itu, bahwa komponen dari modul ajar lebih banyak apabila dibandingkan dengan RPP.

KESIMPULAN

Berpijak dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa penerapan kurikulum di Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate baru terutama pada kurikulum merdeka ini dibutuhkan adanya pelatihan yang tidak hanya dilakukan sekali namun secara terus-menerus untuk mengkaji lebih dalam komponen dari setiap kurikulum yang akan diterapkan. Penelitian ini ditemukan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun modul ajar, penilaian sumatif, serta asesmen diagnostik. Penerapan kurikulum merdeka di Sekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate masih mengalami beberapa hambatan. Terutama kaitannya dengan pemahaman guru yang masih kurang. Menurut pendapat narasumber, dalam menghadapi permasalahan tersebut narasumber sudah mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan baik di gugus maupun pelatihan lainnya. Namun kurikulum merdeka ini, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mempelajari bagian- bagiannya secara mendalam.

Penerapan kurikulum merdeka belajar yang mungkin ini menjadi hal baru bagi para guru yang ada disekolah SMA Negeri 6 Kota Ternate. Untuk itu, dalam hal menyikapi masalah ini kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah bidang Kurikulum menyediakan suatu wadah untuk melakukan sosialisasi tentang tata cara pembuatan bahan ajar yang baru (merdeka belajar) misalnya *workshop* atau pelatihan-pelatihan tentang cara membuat bahan ajar lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifa'i dkk, , (2022): "Penerapan Kurikulum Merdeka Pada Mata Pembelajaran PAI di Sekolah," Jurnal.
- Abdillah Dalimunthe, R. A. (2016). Strategi Dan Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Karakter Di Smp N 9 Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Karakter,(1), 102–111.
- Afrizal. "Metode Penelitian Kualitatif". (Jakarta: Rajagrafin do Persada, 2016)
- Ardiansyah, Y.P. (2019). Hubungan antara motivasi belajar dengan prokrastinasi akademik Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Barlian, U. C., Solekah, S., & Rahayu, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Journal of Educational and Language Research.
- Fuadi & Aswita, (2021). Analisis dampak pelaksanaan program MBKM terhadap tenaga pendidik. Vol (9) 2. Jurnal cerdas Proklamator. 2021.
- Hamid. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Junaidi & dkk, (2020). Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0. Jakarta: Kemendikbud, 2020.
- Kemendikbud, (2020). Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. (2020). Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. Edisi Pertama (1-5).
- Maghfiroh & Sholeh. (2020). "Implementasi MBKM dalam menghadapi era disrupsi dan era society" 5.0 Jurnal: Inspirasi Manajemen Pendidikan. (09). 2022.
- Nur Asiah, (2021). Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Journal: Ilmu Sosial Dan Hukum. 2 (2). Hal: 7.
- Siregar & dkk, (2020). "Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0". Fitrah: Journal of Islamic Education, 1(1), 188.
- Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung:Alphabet.
- Utomo, 2013. Media Pembelajaran Aktif. Bandung: Nuansa Cendekia